PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 1 No. 3, September (2021)
e-ISSN: 2797-0469

PENGEMBANGAN DESA WISATA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE

Bagoes Soenarjanto
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
bagoes87@untag-sby.ac.id

Arif Darmawan
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
arif@untag-sby.ac.id

Tri Yuliyanti
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
triyuli@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Desa Gununganyar menjadi desa yang layak untuk dikembangkan menjadi desa wisata dengan segala potensi yang dimilikinya termasuk dana yang menjadi kriteria desa wisata juga terpenuhi. Namun patut disayangkan bahwa Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah belum mampu mengembangkan potensi desa tersebut menjadi desa wisata. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses pengembangan Desa Wisata Gununganyar dalam perspektif collaborative governance dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam proses pengembangan potensi Desa Wisata Gununganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data di Desa Gununganyar berupa inventarisasi data primer dan sekunder menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengembangan desa wisata Gununganyar sudah terjadi proses collavorative governance yang ditandai dengan adanya bentuk kerja sama antar stakeholder yang saling mendukung, namun belum sepenuhnya berhasil karena kriteria keberhasilan yang terpenuhi hanyalah akses terhadap aktivitas dan kepercayaan diantara para stakeholder. Untuk mengoptimalkan proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Gununganyar, peneliti merekomendasikan bahwa masyarakat dapat dengan aktif bekerjasama dengan pihak pemerintah desa maupun pihak swasta dan juga berperan aktif mengoptimalkan segala potensi dan menjaga asset desa wisata Gununganyar, disamping Pemerintah desa diharapkan mampu memberikan perhatian terkait pendampingan, monitoring dan pelibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan agar terjalin kerjasama dan harmonisasi komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Kebijakan dari pemerintah desa juga harus berorientasi pada pengoptimalan peran serta semua pihak dalam pengembangan desa wisata Gununganyar.

Kata Kunci: *Pengembangan Desa Wisata, Collaborative Governance*

A. PENDAHULUAN

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkanya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cindera mata, dan kebutuhan wisata lainnya. Kriteria suatu desa dapat dikembangan menjadi desa wisata, apabila memiliki beberapa faktor-faktor pendukung antara lain memiliki potensi produk dan daya tarik, memiliki dukungan sumber daya manusia, motivasi kuat dari masyarakat, memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai, mempunyai fasilitas pendukung kegiatan wisata, mempunyai kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata, dan ketersediaan lahan yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Kawasan desa wisata juga dipersyaratkan memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata.

Desa Gununganyar yang terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah salah satu desa yang mempunyai panorama alam dan kearifan lokal yang mulai dilirik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk dikembangkan menjadi salah satu wilayah pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa wisata di Tuban. Gununganyar merupakan sebuah pedesaan yang berada di Kawasan gugusan perbukitan kapur di Kabupaten Tuban yang mempunyai panorama alam eksotis dengan latar belakang hamparan sawah terasiring, perkebunan mawar, waduk diatas perbukitan, bumi perkemahan dan kampung warna-warni. Bukan hanya panorama alamnya yang menarik, Desa Gununganyar juga mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang unik seperti "Ngesat ngerong" atau menguras waduk dan upacara sedekah bumi. Dengan potensi alam dan kearifan lokal yang dimilikinya, desa Gununganyar sangat strategis untuk dikembangkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah sebagai desa wisata di Kabupaten Tuban karena mempunyai produk wisata yang mampu dikemas sebagai atraksi wisata. Akhir tahun 2017 rombongan Bupati Tuban dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban meninjau Waduk Ngerong Desa Gununganyar dan ditindak lanjuti dengan perbaikan beberapa fasilitas pendukung untuk pengembangan kawasan tersebut menjadi salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Tuban. Sangat disayangkan dengan segala potensi yang ada,

Pemerintah Desa Gununganyar dan Pemerintah Kabupaten Tuban masih belum bisa mengoptimalkan pengembangan kawasan wisata tersebut. Terbengkalai dan belum selesainya pembangunan hanya dinarasikan karena kurangnya anggaran yang dikucurkan, ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dengan kepemilikan fasilitas yang ada dikawasan Wisata Alam Gunungayar (WAG) memperparah kondisi wisata tersebut yang tidak terawat.

Alasan pemilihan Wisata Alam Gununganyar di Desa Gununganyar yang diresmikan pada pertengahan tahun 2018 sebagai fokus dan lokus penerapan konsep *collaborative governance* adalah kegelisahan penulis melihat realita potensi yang seharusnya mampu dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Gununganyar justru terbengkalai dengan berbagai fasilitas yang sudah rusak dengan umur pengadaan yang masih muda. Tidak terawatnya area wisata dan kurang sadarnya masyarakat akan kepemilikan wisata tersebut dan tidak adanya respon penanganan dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. Ansell dan Gash menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholder* secara bersamaan didalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. (Ansell dan Alison, 2007:543). Secara Umum Ansell and Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik ataupun aset publik. Dari definisi tersebut maka dapat ditarik benang merah bahwa *Collaborative governance* merupakan upaya integrasi dan kerja sama berbagai *stakeholders* dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan konsep tersebut diharapkan mampu menjadi pemecah masalah dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata di Desa Gununganyar dan tercipta sinergitas antara masyarakat atau komunitas, swasta, akademisi dan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi desa wisata. Desa Gununganyar sangat tepat dijadikan desa wisata yang layak untuk dikembangkan karena didukung dengan adanya potensi wisata yang beragam dan menarik serta kearifan lokal yang unik, oleh karena itu diharapkan dapat dikelola dengan baik agar mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Mengacu dari pembahasan mengenai *collaborative governance*, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari adanya hubungan saling ketergantungan antar pihak. *Collaborative governance* juga dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan antar aktor *governance*. Melalui perspektif *collaborative governance*, maka tujuan positif dari masing - masing pihak dapat tercapai. Selanjutnya menurut Ratner, dalam proses *collaborative governance* terdapat tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. (Ratner, 2012:5) yaitu:

1. Identifying Obstacles and Opportunities (Fase Mendengarkan)

Pada tahap ini pemerintah dan *stakeholders* yang melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat, akan melakukan identifikasi mengenai

berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini pula setiap *stakeholders* saling menerangkan mengenai apa yang menjadi permasalahan dan *stakeholders* lainnya saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing - masing stakeholders yang terlibat. Dari proses tersebut kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah melalui proses identifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi.

2. Debating Strategies For Influence (Fase Dialog)

Pada tahap ini, *stakeholders* yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog atau diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh *stakeholders* yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah apa yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak yang mampu mendukung dalam proses penyelesaian permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang telah diterangkan.

3. Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan)

Setelah melalui proses tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan proses diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, maka pada tahap ini *stakeholders* yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari tiap strategi yang telah didiskusikan sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar *stakeholders* yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung jangka panjang.

Dari tahapan proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ratner, Goldsmith dan Kettl menyempurnakan dengan menyebutkan bahwa terdapat hal - hal penting yang bisa dijadikan tolok ukur kriteria keberhasilan sebuah kolaborasi dalam *governance*, yaitu: *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources.* (Goldsmith dan Donald, 2009:135-136).

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengembangan Desa Wisata Gununganyar dalam perspektif *collaborative governance* dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana *collaborative governance* dalam proses pengembangan potensi Desa Wisata Gununganyar.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan berfokus pada bagaimana proses pengembangan Desa Wisata Gununganyar dalam perspektif *collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan memberikan gambaran isu – isu strategis proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Gununganyar. Untuk pengumpulan datanya

merupakan inventarisasi antara data primer dan data sekunder. Untuk data primer didapatkan dari data empiris dilapangan melalui teknik wawancara secara langsung dengan berbagai *stakeholders* yang ada keterkaitan dengan penelitian ini dan observasi terhadap fenomena yang ada dilapangan. Untuk data sekunder berasal dari literasi jurnal ilmiah dan dokumentasi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Gununganyar. Dari keseluruhan data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini mengenai analisa tahapan proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Berdasarkan konsep *collaborative governance* seperti yang dikemukakan oleh Ratner, terdapat tiga tahapan yang mana tujuannya untuk melihat kriteria apa saja yang telah terpenuhi dari masing-masing tahapan tersebut, tahapan – tahapan tersebut antara lain:

1. Tahap pertama : *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

   Dalam proses pemerintahan kolaboratif tahap pertama ini adalah mengidentifikasi mengenai peluang potensi desa wisata di Gununganyar. Mengidentifikasi area mana saja yang akan dikembangkan dan dilakukan pembangunan wisata atau fasilitas objek wisata dan bagaimana hambatan yang akan terjadi ketika area tersebut menjadi pilihan untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Dalam konteks ini penentuan area yang dipilih adalah waduk ngerong dan bumi perkemahan yang dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di desa gununganyar dengan mengusung konsep wisata alam. Waduk ngerong dan bumi perkemahan disampingnya masuk dalam kawasan objek wisata Wisata Alam Gununganyar (WAG). Penentuan pembangunan dan pengembangan Wisata Alam Gununganyar (WAG) tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gununganyar tahun 2017. Kawasan tersebut memang sangat layak dikembangkan menjadi destinasi wisata alam di Desa Gununganyar karena tempatnya yang mempunyai panorama alam yang indah dan sudah banyak dikenal masyarakat di daerah Tuban dan Bojonegoro meskipun dulunya masih belum dikembangkan sebagai area wisata dan hanya menjadi sarana irigasi warga Desa Gununganyar. Namun sangat disayangkan, harusnya setelah penentuan area yang akan dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan, Pemerintah Desa Gununganyar menggandeng pihak akademisi atau sektor swasta pegiat wisata untuk mengidentifikasi lokasi, kondisi sosial masyarakat dan menganalisa peluang wisata tersebut. Hasil identifikasi dan analisa tersebut sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan strategi dan *master plan* pengembangan desa wisata di desa Gununganyar yang nantinya bisa dijadikan rekomendasi dan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Desa. Penyusunan RPJMD 2017 dimana termuat rencana pembangunan Wisata Alam Gununganyar sudah melalui tahap musyawarah desa yang diikuti oleh Pokdarwis dan perwakilan dari Karang taruna yang selama ini membantu pengelolaan Wisata Alam Gununganyar. Dalam musyawarah desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat utamanya kelompok tani yang memang akan terdampak oleh pembangunan Wisata Alam Gununganyar.

2. Tahap Kedua : *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Pada tahap ini, stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai peluang dan hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Dalam tahap ini langkah pertama yang diambil yaitu mengidentifikasi proses dialog antar aktor. Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa Gununganyar mengadakan musyawarah desa guna pembahasan perencanaan dan proses pembangunan Wisata Alam Gununganyar (WAG). Dalam musyawarah desa yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan Wisata Alam Gununganyar (WAG) harusnya dihadirkan pula dinas – dinas terkait dari satuan kerja perangkat dinas Kabupaten Tuban seperti Dinas Pariwisata dan juga perwakilan dari pihak kecamatan untuk membahas pembangunan seperti apa yang diperlukan dan bagaimana dukungan dari pemerintah kabupaten terkait rencana tersebut. Namun pada proses dialog antar aktor dalam musyawarah desa, Nampak terlihat bahwa kewenangan keputusan untuk penyelenggaraan pembangunan Wisata Alam Gununganyar (WAG) lebih didominasi oleh pemerintah desa (*top down policy*).

3. Tahap Ketiga : *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, maka pada tahap ini stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya. Merencanakan tindakan kolaboratif dari adanya pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Wisata Alam Gununganyar adalah bagian dari tahap ini. Langkah awalnya dimulai dengan membuat perencanaan yang melibatkan berbagai pihak. Perencanaan ini disusun secara sistematis serta memuat tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya POKDARWIS sebagai pengelola wisata, karang taruna sebagai penjaga keamanan dan pengawasan fasilitas yang ada diarea wisata, BPD sebagai fasilitator proses evaluasi dan komunikasi ke masyarakat desa, masyarakat desa sebagai penunjang adanya wisata tersebut dengan memanfaatkan lapak jualan yang disediakan diarea wisata dan dilibatkannya pihak swastra atau dari akademisi sebagai penasehat dari pengelolaan wisata tersebut. Perencanaan – perencanaan tersebut tetap harus berpegang teguh dari hasil musyawarah desa yang dihadiri dan disetujui hasilnya oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Setelah melalui proses analisa tahapan *collaborative governance*, maka langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi mengenai penilaian keberhasilan penerapan pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan desa wisata di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Adapun analisa tolok ukur keberhasilan *collaborative governance* akan dijelaskan pada penjabaran dibawah ini.

a. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)

Tata kelola jaringan membuka adanya campur tangan koordinasi diluar pemerintahan. Dalam konteks pembangunan dan pengembangan Wisata Alam Gununganyar (WAG) yang emrupakan destinasi wisata unggulan desa wisata

Gununganyar kolaborasi hanya terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat Sadar Wisata dan Karang Taruna. Kolaborasi tersebut hanya bersifat semi formal tanpa ada perjanjian tertulis dan pembagian tugas yang jelas. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya entitas administras yang jelas. Masing-masing stakeholder tersebut juga pasif pastisipasinya dalam koordinasi jaringan. Jaringan pun belum terbentuk hirarkhinya namun dalam penentuan keputusan ataupun kebijakan, pemerintah desa masih memonopoli hal tersebut. Dapat disimpulkan tipe networked structures yang ada dalam kolaborasi ini adalah tipe self governance.

b. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen dalam mencapai Tujuan)

Kolaborasi yang terjalin antar stakeholder dalam pengembangan Wisata Alam Gununganyar (WAG) selama ini belum sepenuhnya mendasar pada tujuan, visi dan misi yang sama antar masing *stakeholder*. Terkait dengan komitmen dari masing-masing stakeholders, peneliti memperoleh data bahwa tidak keseluruhan stakeholders mempunyai komitmen penuh guna mencapai tujuan bersama dan justru timbul ego sektoral yang menimbulkan konflik dalam jaringan. Harusnya dalam proses pencapaian tujuan peran dari masing-masing stakeholder untuk duduk bersama mengevaluasi proses dan pencapaian pengelolaan Wisata Alam Gununganyar sangat diperlukan dengan agenda yang rutin.

c. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan di antara para *stakeholder*)

Merupakan hubungan professional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholders* atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap *stakeholders* harus saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan professional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif. Terkait dengan kepercayaan atas informasi atau data dari masing-masing stakeholders dalam koordinasi pengelolaan Wisata Alam Gununganyar (WAG) sudah muncul rasa saling percaya stakeholder satu dengan lainnya. Para stakehoders memiliki hubungan personal yang baik karena mereka menyadari akan pentingnya peranan masing-masing yang saling terkait untuk tujuan bersama.

d. *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola pemerintahan)

Dalam struktural pengelolaan Wisata Alam Gununganyar (WAG) belum tergambar dengan jelas siapa pengurusnya mengingat kolaborasi yang terjalin juga belum ada kesepakatan kerja sama atau peraturan tertulis dan belum secara spesifik membentuk keanggotaan yang menangani permasalahan pengelolaan wisata tersebut. Regulasi yang menegaskan adanya pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan apabila perilaku mereka menyimpang ini juga belum ada. Selama ini semua hanya berjalan dalam kerja sama apa adanya sesuai dengan tugas dan peran mereka masing - masing. Kebebasan untuk menentukan bagaimana kolaborasi akan dijalankan dan siapa yang diijinkan disini mengalir apa adanya juga meskipun tetap mengacu pada kesepakatan bersama. Dukungan semua stakeholders tanpa konflik dan pertentangan dalam pencapaian tujuan belum maksimal, terbukti masih timbulnya ego sector, jumlah sumber daya manusia yang mengelola wisata tersebut yang masih terbatas pula, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan minimnya

sumber daya keuangan yang dialokasikan dalam pengembangan Wisata Alam Gununganyar (WAG). Dapat disimpulkan dari keseluruhan analisa diatas kolaborasi yang terjadi belum memenuhi aspek kejelasan tata kelolanya.

e. *Access to Authority* (Akses terhadap otoritas)

Konteks kolaborasi dalam pengembangan Wisata Alam Gununganyar (WAG), keseluruhan *stakeholders* yang ada sudah memahami bagaimana alur prosedurnya dengan jelas dan juga mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing dari mereka sehingga tidak terjadi tumpeng tindih kewenangan.

f. *Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian akuntabilitas / responsibilitas)

Pembagian tata kelola antar stakeholders dalam pengelolaan Wisata Alam Gununganyar sudah ada. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban disini hampir tidak dilakukan oleh tiap-tiap stakeholders. Akuntabilitas maupun responsibilitas dalam pelaksanannya masih tergantung oleh pemerintah desa Gununganyar.

g. *Information Sharing* (Berbagi informasi)

Keseluruhan stakeholders saling mengisi dan melengkapi informasi dan data satu dengan yang lainnya. Semua proses pengelolaan Wisata Alam Gununganyar (WAG) bisa diakses oleh semua stakeholders namun sangat disayangkan untuk proses pembangunannya tidak untuk keseluruhan informasi dapat di akses oleh keseluruhan stakeholders. Masing-masing stakeholders menyatakan adanya kepercayaan terakait informasi yang diberikan oleh stakeholders lainnya dan mereka gotong royong saling membantu.

h. *Access to Resources* (Akses sumber daya)

Dalam rangka mencapai tujuan bersama dari proses kolaborasi,antar stakeholders, sudah berusaha dalam penyediaan sumber daya yang dibutuhkan yakni sumber daya keuangan, manusia dan teknis terkait pembangunan dan pengembangan Wisata Alam Gununganyar (WAG). Meskipun demikian, fakta dilapangan memperlihatkan sumber daya yang dimiliki masih lemah, terbukti dengan adanya fakta bahwa sumber daya keuangan yang terbatas, kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata alam tersebut serta terbatasnya jumlah tenaga teknis atau tenaga ahli dan belum jelasnya konsep pelayanan terhadap pengunjung yang dating menikmati destinasi wisata tersebut.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengembangan desa wisata Gununganyar sudah terjadi proses collavorative governance yang ditandai dengan adanya bentuk kerja sama antar stakeholder yang saling mendukung namun belum sepenuhnya berhasil karena kriteria keberhasilan yang terpenuhi hanyalah akses terhadap aktivitas dan kepercayaan diantara para stakeholder. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, peneliti memberikan rekomendasi sabagai bahan pertimbangan untuk proses kolaborasi dalam pembangunan kedepannya. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata Gununganyar diperlukan proses kolaborasi yaitu masyarakat dapat dengan aktif bekerjasama dengan pihak pemerintah desa maupun pihak swasta dan bisa berperan aktif mengoptimalkan

segala potensi dan menjaga asset Desa Wisata Gununganyar dan Pemerintah Desa diharapkan mampu memberikan perhatian terkait pendampingan, mentoring dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar terjalin kerjasama dan harmonisasi komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa juga harus berorientasi pada pengoptimalan peran serta semua pihak dalam pengembangan desa wisata Gununganyar.

DAFTAR PUSTAKA

Afful-Koomson, T., dan Kwabena O. A. 2013. Collaborative Governance in Extractive Industries in Africa. Africa: Pixedit Limited.

Ansell, C. dan Alison G. 2007. Collaborative Governance In Theory And Practice. Journal Of Public Administration Research And Theory. University of California: Berkeley.

Goldsmith, S., dan Donald F. K. 2009. Unlocking The Power Of Networks: Keys To HighPerformance Government. Brookings Institution Press: Wachington,D.C.

Imanuel, J. (n.d.). *TOURISM COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI PADA KAWASAN WISATA PULAU KEPA KABUPATEN ALOR – NUSA TENGGAR TIMUR)*. Retrieved 3 15, 2020, from http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/158115

Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 5, Nomor 3.

Kumalasari, I., & Dewi, U. (2017). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Gangguan Jiwa Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Collaborative Governance*, 469-476.